



tribunjogja.com HARIAN PAGI **Tribun Jogja** TRIBUNNEWS.COM
 SELASA KLIWON
 28 APRIL 2026
 10 DZULKA'DHAH 1447
 NO 55295 TAHUN 145
 TERBIT 12 HALAMAN

• EGERAN Rp3.000 • LANGGANAN Rp83.000 • INFO IKLAN - LANGGANAN: ☎ 0851 021 22000 ✉ 0274-556791

ANAK-ANAK DIIKAT SEJAK PAGI

■ Pengasuh Daycare Little Aresha Mengaku Diperintah Ketua Yayasan

YOGYA, TRIBUN – Kusatrikarni Indrestia Yogyakarta, Kompol Baski Adrian menagakan, sebelas pengasuh di Daycare Little Aresha Yogyakarta mengaku melakukan tindakan kekerasan karena diperintah oleh Ketua Yayasan.

Adrian mengatakan secara umum tidak ada peraturan tertulis bagi para pengasuh ketika memperlakukan anak-anak yang dititipkan. "Namun dari keterangan para terdakwa, mereka diperintahkan melakukan hal itu (kekerasan) oleh ketua yayasan," kata Adrian.

Perintah itu disampaikan secara lisan atau secara langsung oleh Ketua Yayasan kepada para pengasuh. Artinya, Ketua Yayasan Little Aresha secara sadar mengizinkan dan menyuruh pengasuh melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak.

Dari hasil pemeriksaan sebelas pengasuh, juga disampaikan bahwa cara-cara kekerasan semacam itu sudah turun temurun berlangsung sejak lama. "Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka atau yang sudah keluar. Kemungkinan dari 2018 itu bisa saja," ungkapnya.

• ke halaman 11

DILEPAS SAAT MAKAN DAN DIJEMPUT ORANG TUA

- Tindakan kekerasan yang dialami anak-anak di Little Aresha Yogyakarta dimulai sejak pertama kali mereka tiba.
- Setiap harinya, para pengasuh memaksa anak-anak itu mengikat kaki atau tangan dengan tali.
- Kapan-kala disesat dan dipukul dengan benda tajam saat anak hendak makan atau akan ditempuh orang tua.
- Para pengasuh mengaku melakukan tindak kekerasan karena diperintah oleh ketua Yayasan.
- Perintah itu disampaikan secara lisan atau secara langsung oleh Ketua Yayasan kepada para pengasuh.
- Tindakan kekerasan tersebut juga disaksikan oleh Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah Little Aresha.

Anak-Anak

• Sambungan Hal 1

Guna memperkuat alat bukti, pihak kepolisian telah melakukan visum terhadap tiga anak yang diduga mengalami kekerasan. Rata-rata para anak memiliki luka pada pinggul dan lengan, yang dimungkinkan akibat diikat oleh pengasuh.

Beda saat para pengasuh melakukan cara-cara kekerasan tersebut juga dibuktikan oleh Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah Little Aresha. Karena ketua Yayasan dan kepala sekolah ini selalu hadir di tiap pagi, tegas Adrian.

Adrian membenarkan, tindakan kekerasan yang dialami anak-anak di Little Aresha Yogyakarta dimulai sejak pertama kali mereka tiba. Secara berulang-ulang setiap harinya, para pengasuh memepok pakaian anak-anak.

"Semua mengalami hal yang sama, dari pagi hari, nanti setelah mau makan baru dipakaikan baju, difoto untuk dikirimkan dokumentasi kepada wali murid," terang Adrian.

Kasatreskrim menambahkan, anak-anak selalu diikat setiap saat. Mereka hanya dipas ketika hendak mandi ataupun makan. "Ya, benar (diikat) sampai jamnya selesai. Palingan waktu saat mandi waktu saat makan itu dilepas," tegas Adrian.

Adrian menjelaskan, setiap orang tua memiliki anaknya dengan waktu yang berbeda. Daycare Little Aresha disebut memberikan fleksibilitas waktu bagi orang tua untuk menemani anak, disesuaikan dengan harga-harga paket.

Ada yang dari pagi sampai siang, ada yang dari pagi sampai jam lima sore, itu tergantung wali muridnya," kata dia.

Perbanyak keuntungan
Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandha, mengatakan sementara ini pihak kepolisian menetapkan 13 tersangka. Sebanyak 11 tersangka di antaranya merupakan pengasuh, dua orang lainnya yakni ketua yayasan dan kepala sekolah.

"Motivasi mereka memberikan jasa penitipan anak, karena memang anak-anak ini masih kecil mereka takut meninggalkan yang lain (rezeal) sehingga mereka (pengasuh) melakukan pengikatan pada anak-anak," kata Kombes Pol Eva. Senin (27/4).

Pihak pengelola memang menargetkan adanya keinginan memperbanyak keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan kemampuan para pengasuh. Satu pengasuh harus mengurus 7 sampai 8 anak. Yang mana idealnya satu pengasuh seharusnya mengurus 2 atau 3 anak.

Eva Pandha menjelaskan, para tersangka masing-masing terdiri dari (51) warga Sewon, Bantul, sebagai ketua yayasan; AP (42) warga Gedongtengen, Kota Yogyakarta sebagai kepala sekolah; kemudian FN (30) asal Boyolali, NP (20) warga Kasihan, Bantul; Lis (34) warga Karanganyar; EN (26) warga Imogiri; SRM (54) warga Unruharjo; DR (32) warga Kasihan; HP (47) warga Sedayu; ZA (30) warga Pengasih; SRJ (50)

warga Mergansan; DO (31) warga Banguntoro; dan DM (28) warga Sarolangan, Jember.

Eva menjelaskan, para tersangka dijerat dengan Pasal 76A Jo Pasal 77B atau Pasal 76C Jo Pasal 80 Aya (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 20, Pasal 1 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang dugaan tindak pidana Memperlakukan Anak Secara Diskriminatif atau Menempatkan, Membiarkan, Melibatkan, Menyuruh Melibatkan Anak dalam Situasi Perilaku yang Tidak Perilaku, dan atau Kekerasan terhadap Anak.

Kompol Adrian menambahkan, para tersangka terancam hukuman lima tahun ditambah untuk pasal 21. "Terjadi sekitar 8 tahun penjara. Ini akan kita masukkan ke pasal korporasi juga, dan kita tadi juga sudah koordinasi sama RPA, jadi penjabaran dua pasal lagi," ungkapnya.

Adrian menegaskan, kekerasan yang dilakukan para pengasuh sangat terstruktur dan menjadi SOP. Artinya hal itu diketahui dan disadari oleh Ketua Yayasan maupun pejabat struktural dari Daycare tersebut.

"Motivasi, dari keterangan dari para pelaku ya, ada orang tua itu mengahndi untuk sampai 20 orang. Mereka kesulitan untuk melakukan pekerjaan dari mandiri, menggunakan jasa. Sehingga diperintah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi tersebut," ungkap Adrian.

Lebih jauh, Kompol Adrian membenarkan bahwa Ketua Dewan Yayasan Daycare Little Aresha Yogyakarta bernialsi RIL merupakan hakim aktif di salah satu Pengadilan Negeri (PN). Pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).

Tadi sudah ada Bawas dari MA datang kesini untuk melakukan koordinasi. Bahkan nanti Bawas dari MA besok ingin melihat langsung pemeriksaan terhadap para tersangka," katanya.

Riski menuturkan, tidak menutup kemungkinan pihak penyidik akan melakukan pemanggilan guna mengonfirmasi peran RIL. "Ya, kita nanti lihat perkembangan besok. Lihat pemeriksaan dari Pengawas dari MA," ungkapnya.

Kasatreskrim juga sudah mengonfirmasi bahwasanya RIL memang merupakan hakim aktif di salah satu Pengadilan Negeri. "Ya, dia (hakim) sudah terkonfirmasi," tutur Riski Adrian.

Hingga saat ini penyidik kepolisian masih terus membukukan pendalaman untuk mengungkap tersangka baru. Polisi juga menegusut tuntas kasus dugaan kekerasan di Little Aresha Yogyakarta.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan keprihatinannya meski mengaku belum mengetahui secara pasti apa motif di balik tindakan pengelola penitipan anak tersebut. Ia berharap insiden serupa ini menjadi kasus yang pertama dan terakhir di wilayahnya.

"Karena di Yogya itu tidak senang dengan kekerasan, sehingga saya tidak tahu sebetulnya background yang mendasari kekerasan itu dilakukan," ujar Sri Sultan saat ditemui wartawan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (27/4).

Sultan memastikan bahwa Pemerintah Daerah DIY telah mengambil langkah pengamanan. Ia menandatangani pengamangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3A) DIY pada Selasa (28/4) untuk mendengarkan laporan komprehensif sekaligus memastikan keselamatan para korban.

Menanggapi proses penanganan hukum, Sultan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan mengambil semua pihak untuk tidak menduduhui penyelidikan yang sedang berjalan.

"Ya itu otomatis kan sudah jadi tersangka, nanti kan ada proses hukumnya tersendiri. Tapi dalam hal ini, polisi kan sudah melakukan penyelidikan. Saya kira itu kita tunggu saja, kita jangan membahut," tegasnya.

Kasus terbanyak
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ri Dyah Puspitarni, mengatakan selama tiga tahun terakhir tercatat telah terjadi lima kali tindak kekerasan yang menimpa anak di daycare.

Lima kejadian tersebut yakni di Kepulauan Sekeloa, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan terbaru di Little Aresha Yogyakarta. "Di Yogyakarta ini terbesar selama tiga tahun terakhir. Karena korbananya ada banyak," katanya, saat jumpa pers di Mapolresta Yogyakarta, Senin (27/4).

Berkaca dari kasus yang pernah terjadi, daycare yang bernialsi rata-rata tidak mengotomati izin operasional. KPAI juga mengendus adanya kejahatan yang sistematis dan terstruktur pada kasus kekerasan di Daycare Little Aresha Yogyakarta.

"Kami menunggu bahwa kekerasan itu dilakukan secara sistematis dan terstruktur karena dilakukan lebih dari satu orang. Bahkan belasan orang," ungkapnya.

Atas kejadian ini KPAI berpesan kepada para orang tua supaya lebih berhati-hati ketika memilih tempat penitipan anak. "Bagi para orang tua seluruh Indonesia harus wasas diri, karena banyak daycare yang tidak memiliki izin," terangnya.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kem PP/PA), 44 persen layanan daycare saat ini beroperasi tanpa izin atau legalitas. 30,7 persen memiliki izin operasional resmi. Sisanya, sebanyak 12 persen hanya memiliki tanda daftar, dan 13,3 persen berbadan hukum.

Personel mendasar juga ditemukan pada tiga lembaga dan kualitas tenaga pendidik. Tercatat sekitar 20 persen daycare belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), dan 66,7 persen Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola belum tersertifikasi. Proses rekrutmen pengasuh umumnya belum berbasis standar dan minim pelatihan khusus.

"Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap layanan daycare belum diimbangi dengan kualitas layanan yang menjamin pemenuhan hak anak secara optimal," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifin Fauz.

Sultan memastikan bahwa Pemerintah Daerah DIY telah mengambil langkah pengamanan. Ia menandatangani pengamangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3A) DIY pada Selasa (28/4) untuk mendengarkan laporan komprehensif sekaligus memastikan keselamatan para korban.

Menanggapi proses penanganan hukum, Sultan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan mengambil semua pihak untuk tidak menduduhui penyelidikan yang sedang berjalan.

"Ya itu otomatis kan sudah jadi tersangka, nanti kan ada proses hukumnya tersendiri. Tapi dalam hal ini, polisi kan sudah melakukan penyelidikan. Saya kira itu kita tunggu saja, kita jangan membahut," tegasnya.

Kasus terbanyak
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ri Dyah Puspitarni, mengatakan selama tiga tahun terakhir tercatat telah terjadi lima kali tindak kekerasan yang menimpa anak di daycare.

Lima kejadian tersebut yakni di Kepulauan Sekeloa, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan terbaru di Little Aresha Yogyakarta. "Di Yogyakarta ini terbesar selama tiga tahun terakhir. Karena korbananya ada banyak," katanya, saat jumpa pers di Mapolresta Yogyakarta, Senin (27/4).

Berkaca dari kasus yang pernah terjadi, daycare yang bernialsi rata-rata tidak mengotomati izin operasional. KPAI juga mengendus adanya kejahatan yang sistematis dan terstruktur pada kasus kekerasan di Daycare Little Aresha Yogyakarta.

"Kami menunggu bahwa kekerasan itu dilakukan secara sistematis dan terstruktur karena dilakukan lebih dari satu orang. Bahkan belasan orang," ungkapnya.

Atas kejadian ini KPAI berpesan kepada para orang tua supaya lebih berhati-hati ketika memilih tempat penitipan anak. "Bagi para orang tua seluruh Indonesia harus wasas diri, karena banyak daycare yang tidak memiliki izin," terangnya.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kem PP/PA), 44 persen layanan daycare saat ini beroperasi tanpa izin atau legalitas. 30,7 persen memiliki izin operasional resmi. Sisanya, sebanyak 12 persen hanya memiliki tanda daftar, dan 13,3 persen berbadan hukum.

Personel mendasar juga ditemukan pada tiga lembaga dan kualitas tenaga pendidik. Tercatat sekitar 20 persen daycare belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), dan 66,7 persen Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola belum tersertifikasi. Proses rekrutmen pengasuh umumnya belum berbasis standar dan minim pelatihan khusus.

nya (27/4).
Dikalakannya, pegawai Dinkes Bantul tersebut bernama Dina Dewi Septiyani, S.K.M yang bekerja dari pagi sampai sore di Kantor Dinkes Bantul. "Posisi yang bersangkutan sebagai aparatur sipil negara di Dinkes yang dari pagi sampai sore berada di kantor," jelas Agus.

Ia juga memastikan bahwa Dina Dewi Septiyani, S.K.M. bukanlah pengurus atau pengelola Daycare Little Aresha tersebut. Pihaknya akan turun anadi untuk membantu pejawatnya yang menjadi korban salah sasaran bujukan netizen, jika belum terselesaikan.

"Nanti kita lihat perkembangannya dulu. Mudah-mudahan sudah terselesaikan dengan baik," harunya.

Salah sasaran
Baru-baru ini, ramai di media sosial, salah satu pegawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul dituju netizen dari kasus Daycare Little Aresha. Belakangan diketahui bahwa pegawai Dinkes Bantul tersebut hanya memiliki nama yang sama dengan pegawai Daycare Little Aresha.

"Ternyata memang namanya sama persis, tetapi beda gelar," kata Kepala Dinkes Kabupaten Bantul, Agus Tri Wibisono, Se-

yang terlibat dalam pengelolaan daycare tersebut dalam kapasitas pribadi. Sebagai institusi, UGM tidak memiliki relasi apa pun dengan Yayasan Daycare Little Aresha Yogyakarta," katanya. Senin (27/4).

Pihaknya pun menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan Daycare Little Aresha. "Kami juga menyempatkan empati yang tulus kepada para penyintas, khususnya anak-anak, beserta keluarga yang terdampak," sambungnya.

Terkait dengan penanganan perkara dugaan kekerasan anak, UGM menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya pun siap mengambil langkah tindak lanjut sesuai kapasitas UGM berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Kami juga menjangkau tingkat prinsip objektivitas serta komitmen terhadap perlindungan anak. Sejalan dengan itu, kami terus menantau perkembangan kasus ini dengan seksama dan siap mengambil langkah tindak lanjut sesuai kapasitas UGM berdasarkan ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (ada/aka/nel/ma/ha/ke)

I Made menegaskan keterlibatan Cahyaningrum dalam pengelolaan daycare merupakan kapasitas personal. "Yang bersangkutan benar merupakan dosen aktif

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 18 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005